



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS MARYONO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **852436**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.902.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m²/140 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m²/120 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 338 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.352.000.000
4. Tanah Seluas 339 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/180 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m²/25 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 454.500.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA NF11A1C M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, HONDA HRV RU1 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



5. MOBIL, SUZUKI ST-150 PICK UP Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 45.000.000

6. MOTOR, VIAR VR 150 3R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 709.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 200.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.285.775.511

F. HARTA LAINNYA Rp. 250.000.000

Sub Total Rp. 10.801.775.511

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.801.775.511

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.